



MUTU PENDIDIKAN UNTUK JENJANG SEKOLAH DASAR



Dr. Harlen Simanjuntak, M.Pd.
Dr. Bakti Tonni Endaryono, MM
Dr. Dearlina Sinaga, Se., MM

Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si.
Elza Leyli Lisnora Saragih, S.S., M, HUM



MUTU PENDIDIKAN UNTUK JENJANG SEKOLAH DASAR



Dr. Harlen Simanjuntak, M.Pd.
Dr. Bakti Tonni Endaryono, MM
Dr. Dearlina Sinaga, Se., MM

Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si.
Elza Leyli Lisnora Saragih, S.S. .M, HUM

Mutu Pendidikan Untuk Jenjang Sekolah Dasar

CV. PENERBIT QIARA MEDIA

93 hlm: 15,5 x 23 cm

Copyright @2022

Dr. Harlen Simanjuntak, M.Pd.

ISBN: 978-623-436-005-9

Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2021

Penulis:

Dr. Harlen Simanjuntak, M.Pd.

Dr. Bakti Tonni Endaryono, MM

Dr. Dearlina Sinaga, Se., MM

Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si.

Elza Leyli Lisnora Saragih, S.S. .M, HUM

Editor: Tim Qiara Media

Layout: M Rasyid Dwi Akbar

Desainer Sampul: Kharisma Amalia

Gambar diperoleh dari www.google.com

Cetakan Pertama, 2022

Diterbitkan oleh:

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: qiaramediapartner@gmail.com

Web: qiaramedia.wordpress.com

Blog: qiaramediapartner.blogspot.com

Instagram: [qiara_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

- a. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- b. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik.

Penulis berharap buku **Mutu Pendidikan Untuk Jenjang Sekolah Dasar** ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih disampaikan kepada orang tua dan kerabat penulis, serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku baik itu dalam hal ejaan dan tata bahasa, materi, maupun tata letak. Untuk itu, sudilah kiranya para pembaca dapat memaklumi dan memberikan kritik serta saran yang membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik dalam penyusunan buku berikutnya. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi bagi semua pihak yang membutuhkan.

1 April 2022
Penulis

Dr. Harlen Simanjuntak, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I URGENSI MUTU PENDIDIKAN	1
BAB II MANAJEMEN MUTU SEKOLAH DASAR	7
2.1 Pengertian Manajemen Mutu Sekolah Dasar	8
2.2 Tujuan dan manfaat Manajemen Mutu Sekolah.....	8
2.3 Prinsip Mutu Pendidikan	9
2.4 Strategi pelaksanaan Manajemen Mutu Sekolah Dasar	10
2.5 Faktor pendukung keberhasilan Manajemen Mutu Sekolah Dasar.....	11
2.6 Total Quality Management (TQM)	13
2.7 Ruang Lingkup Manajemen Mutu Sekolah Dasar	15
BAB III MUTU PENDIDIKAN DALAM PERSPEPEKTIF PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	19
BAB IV KEPALA SEKOLAH DAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN	27
4.1 Faktor Standarisasi	29
4.1.1 Standar Nasional Pendidikan	29
4.1.2 Standar Kompetensi Lulusan	29
4.1.3 Standar Isi	30
4.1.4 Standar Proses	30
4.1.5 Standar Penilaian.....	30
4.1.6 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30
4.1.7 Standar Sarana Prasarana	30
4.1.8 Standar Pengelolaan	31
4.1.9 Standar Pembiayaan	31
4.1.10 Sistem Pendataan Mutu Pendidikan.....	31
4.2 Kepala Sekolah	33
4.2.1 Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah.....	33

4.2.2 Strategi-strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.....	37
4.2.2.1 Strategi kepala sekolah dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan	37
4.2.2.2 Strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan	39
4.2.2.3 Strategi kepala sekolah dalam pengawasan peningkatan mutu pendidikan	40
BAB V MUTU DAN KUALITAS PENDIDIKAN TERHADAP MURID	45
5.1 Efek Tinggi atau Rendahnya Mutu dan Kualitas Pendidikan.....	46
5.2 Pengertian Standarnisasi Pendidikan	47
5.3 Kultur Sekolah dalam Peningkatan Mutu dan Kualitas	51
BAB VI IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.....	66
6.1 Implementasi strategi peningkatan mutu pembelajaran	69
6.2 Evaluasi Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran	70
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

URGENSI MUTU PENDIDIKAN



Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Sekolah Dasar sebagai intitusi pendidikan dasar, merupakan wadah tempat proses pendidikan untuk anak usia 7 – 12 tahun, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis serta memiliki kekhasan yang sangat unik . Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang komplek dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah dasar dipandang sebagai suatu organisasi pendidikan yang membutuhkan pengelolaan yang sangan intensif guna mewujudkan mutu dalam institusi tersebut. Lebih dari itu, kegiatan inti organisasi sekolah dasar adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki pengetahuan dasar yang utuh pada

tataran kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sekolah dasar dipandang sebagai suatu organisasi yang didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kompetensi untuk anak-anak dan mengarahkan pada minat dan bakat peserta didik melalui identifikasi sedini mungkin sehingga mampu memberikan stimulus kepada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya kapanpun dan dimanapun.

Faktor-faktor yang menyebabkan mutu pendidikan sekolah dasar tidak mengalami peningkatan secara merata. Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional diselenggarakan secara birokratik- sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang- kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat.

Faktor ketiga, peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam

penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, padahal terjadi atau tidaknya perubahan di sekolah sangat tergantung pada guru.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, tentu saja perlu dilakukan upaya- upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan yaitu melalui manajemen mutu sekolah.

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebab pendidikan di sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan dasar yang berfungsi sebagai peletakan dasar- dasar keilmuan dan membantu mengoptimalkan perkembangan anak melalui pembelajaran yang dibimbing oleh guru. Tujuan akhir pendidikan dasar ialah diperolehnya pengembangan pribadi anak yang membangun dirinya dan ikut serta bertanggung jawab terhadap pengembangan kemajuan bangsa dan negara, mampu melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi, dan mampu hidup dimasyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan yang dimilikinya yang sejalan dengan nilai- nilai yang ada dalam lingkungan tempat ia berada.

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah masalah lemahnya pelaksanaan proses pembelajaran yang diterapkan para guru di sekolah. Proses pembelajaran yang terjadi selama ini kurang mampu mengembangkan kemampuan

berpikir peserta didik. Pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya diarahkan pada kemampuan siswa untuk menghafal informasi, otak siswa dipaksa hanya untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diperoleh untuk menghubungkannya dengan situasi kehidupan sehari-hari. Para guru belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kreatif dalam melibatkan siswa serta belum menggunakan berbagai pendekatan atau strategi pembelajaran yang bervariasi berdasarkan karakter materi pelajaran. Proses penilaian yang dilakukan selama ini semata-mata hanya menekankan pada penguasaan konsep yang dijarang dengan tes tulis objektif dan subjektif sebagai alatukurnya. Dengan cara penilaian seperti ini, berarti pengujian yang dilakukan oleh guru baru mengukur penguasaan materi saja dan itu pun hanya meliputi ranah kognitif tingkat rendah. Keadaan semacam ini merupakan salah satu indikasi adanya kelemahan pembelajaran di sekolah.

Penyebab utama kelemahan pembelajaran tersebut adalah karena kebanyakan guru tidak melakukan kegiatan pembelajaran dengan memfokuskan pada pengembangan keterampilan proses sains anak. Pada akhirnya, keadaan semacam ini yang menyebabkan kegiatan pembelajaran dilakukan hanya terpusat pada penyampaian materi dalam buku teks saja. Keadaan seperti ini juga mendorong siswa untuk berusaha menghafal pada setiap kali akan diadakan tes atau ulangan harian atau tes hasil belajar, baik ulangan tengah semester (UTS), maupun ulangan

akhir semester (UAS). Padahal, untuk anak jenjang sekolah dasar, menurut Marjono (dalam Susanto, 2013 : 167), menyatakan bahwa hal yang harus diutamakan adalah bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu dan daya berpikir kritis mereka terhadap suatu masalah.

Salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di sekolah adalah motivasi belajar. Motivasi belajar yang tinggi berkorelasi dengan hasil belajar yang baik, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. Jika motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan, maka dapat diharapkan bahwa prestasi belajar siswa juga akan meningkat.

Strategi meningkatkan motivasi belajar siswa sering menjadi masalah tersendiri bagi para guru karena terdapat banyak faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Guru menerapkan prinsip-prinsip motivasi belajar siswa dalam desain pembelajaran, yaitu ketika memilih strategi dan metode pembelajaran. Pemilihan strategi dan metode tertentu ini akan berpengaruh pada motivasi belajar siswa.

BAB II

MANAJEMEN MUTU SEKOLAH

DASAR



2.1 Pengertian Manajemen Mutu Sekolah Dasar

Secara etimologi manajemen berasal dari bahasa Inggris “management” yang dikembangkan dari kata “to manage” yang berarti mengatur atau mengelola. Menurut Terry manajemen adalah suatu proses yang melibatkan pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasi yang nyata. Follet mengatakan manajemen adalah kiat. Mutu berarti agenda utama. Syarbini berpendapat mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf berupa kepandaian, kecerdasan, kecakapan dan sebagainya. Sekolah Dasar dalam Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 14 menjelaskan Jenjang pendidikan dasar bagian dari tahapan dalam pendidikan formal.

Berdasarkan pengertian di atas maka Manajemen Mutu Sekolah Dasar merupakan proses mengelola kinerja berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pada sekolah dasar. Mutu dalam pandangan individu satu dengan lainnya memiliki standarisasi yang berbeda, masyarakat akan hanya bisa menilai mutu dari sekolah dasar pada saat sekolah dasar tersebut dibandingkan dengan sekolah dasar lainnya, maka akan nampak mutu dari lembaga atau sekolah dasar yang sedang dibandingkan.

2.2 Tujuan dan manfaat Manajemen Mutu Sekolah

Manajemen Mutu Sekolah Dasar bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah dasar melalui

pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lebih rincinya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah.
4. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.
5. Memperdayakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan yang berhasil guna dan berdaya guna.

2.3 Prinsip Mutu Pendidikan

Deming sebagaimana dikutip oleh Nasution mengungkapkan beberapa prinsip mutu sebagai berikut:

- 1) Menciptakan konsistensi tujuan untuk memperbaiki produk agar bersaing.
- 2) Mengadopsi filosofi baru.
- 3) Menghentikan ketergantungan pada adanya inspeksi dan digantikan dengan upaya pencapaian mutu.

- 4) Menghentikan anggapan bahwa penghargaan dalam bisnis terletak pada harga
- 5) Tingkatkan terus sistem produksi dan jasa agar kualitas dan produktivitas semakin meningkat.
- 6) Terapkan on the job training.
- 7) Tenaga kerja dan teknologi bisa berjalan dengan baik.
- 8) Hilangkan rasa takut agar setiap orang agar setiap orang bisa bekerja dengan efektif.
- 9) Bekerjasama dalam tim.
- 10) Pemantapan metode yang dapat meningkatkan mutu.
- 11) Hilangkan kuota.
- 12) Hilangkan penghambat.

2.4 Strategi pelaksanaan Manajemen Mutu Sekolah Dasar

Strategi adalah langkah-langkah sistematis dan sistemik dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh (makro) dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan model Manajemen Mutu Sekolah. Perlu disadari bahwa reformasi manajemen pendidikan persekolahan dengan menggunakan model Manajemen Mutu Sekolah merupakan tuntutan yang mendesak. Namun demikian, tuntutan Manajemen Mutu Sekolah bukanlah satu- satunya model yang dapat mendongkrak mutu pendidikan tanpa dukungan faktor lain. Ada sejumlah faktor lain yang mendukung dan menentukan diantaranya tingkat prestasi stakeholder dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Artinya sekolah tidak dapat berjalan sendiri dalam upaya meningkatkan mutu efisiensi, pemerataan pendidikan dan kemandirian sekolah.

Kondisi politik atau kebijakan pemerintah dalam hal manajemen/organisasi/kepemimpinan, proses belajar mengajar, sumber daya manusia dan administrasi sekolah merupakan sejumlah komponen Manajemen Mutu Sekolah yang diperlukan dalam konteks persekolahan di Indonesia.

Penerapan disesuaikan dengan pemberlakuan Manajemen Mutu Sekolah dibagi dalam tiga tingkatan Manajemen Mutu Sekolah secara penuh (tinggi), Manajemen Mutu Sekolah tingkat menengah (sedang), sekolah dan Manajemen Mutu Sekolah secara minimal (rendah). Dalam menentukan tingkatan sekolah dan Manajemen Mutu Sekolah ada lima persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu :

1. Pemilihan Kepala sekolah dan guru
2. Pembentukan partisipasi masyarakat
3. Lokasi/kemampuan dasar orang tua
4. Kemampuan pengadaan dana
5. Nilai ujian murni

2.5 Faktor pendukung keberhasilan Manajemen Mutu Sekolah Dasar

Implementasi Manajemen Mutu Sekolah akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya internal di lingkungan sekolah ataupun faktor eksternal di luar sekolah. Secara umum beberapa faktor pendukung Manajemen Mutu Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah yang professional

Manajemen Mutu Sekolah akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar.

- b. Kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan

Faktor eksternal akan turut menentukan keberhasilan Manajemen Mutu Sekolah adalah kondisi tingkat pendidikan orang tua siswa dan masyarakat¹⁰. Kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk terus belajar.

- c. Dukungan pemerintah

Faktor ini sangat menentukan efektivitas dan implementasi Manajemen Mutu Sekolah terutama bagi sekolah yang kemampuan orang tua/masyarakatnya relatif belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Alokasi dana pemerintah (APBN/APBD) sekurang-kurangnya 20% dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah kepada sekolah menjadi penentu keberhasilan.

- d. Profesionalisme

Faktor ini sangat strategis menentukan mutu dan kinerja sekolah. Tanpa profesionalisme kepala sekolah, guru, pengawas, dan tenaga kependidikan yang lain akan sulit dicapai PBM yang bermutu serta prestasi siswa.

2.6 Total Quality Management (TQM)

TQM (Total Quality Manajemen) atau Manajemen Mutu Terpadu (MMT) di bidang pendidikan merupakan konsep baru dalam rangka meningkatkan mutu total bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna (customers) siswa dan masyarakat.

Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan manajemen yang memusatkan perhatian pada peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen terkait. Kunci pokok keberhasilan atau kegagalan implementasi TQM adalah manajemen komitmen. Apabila manajemen mempunyai dan memegang teguh komitmennya, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Sebaliknya, apabila mereka kurang komitmen bisa dipastikan bahwa organisasi akan mengalami kegagalan mencapai TQM. Komitmen terhadap waktu ini berupa kesadaran manajemen bahwa implementasi TQM, tergantung pada kondisi sekolah, memerlukan pengorbanan waktu. Dalam hal ini manajemen harus menyediakan waktu yang cukup berkonsentrasi pada TQM.

Komponen yang terkait dengan TQM Pendidikan:

a. Continous Improvement

Continous Improvement adalah Perbaikan secara terus menerus, konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan mutu secara terus menerus terhadap program dan kinerja pada semua komponen yang terlibat dalam

penyelenggaraan pendidikan. Perbaikan menuju kesempurnaan merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga secara bertahap dan terencana.

b. Quality Assurance

Quality Assurance adalah Menentukan standar mutu, konsep ini berada pada tahapan perencanaan (planning) dalam fungsi manajemen. Beberapa program yang ingin dicapai didesain berpedoman pada mutu. Aplikasi dari konsep ini berada pada Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dan rencana kerja sekolah (RKS).

c. Change of culture

Change of culture adalah Perubahan kultur, yang dimaksud dalam konsep ini adalah merubah budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi semua komponen organisasional. Jika manajemen ini ditetapkan di instansi pendidikan, maka pihak pimpinan harus berusaha membangun kesadaran para anggotanya, mulai dari pemimpin sendiri, staf, guru, pelajar dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk sadar akan mutu dalam pendidikan.

d. Upside down organization

Upside down organization adalah Perubahan organisasi, jika visi misi serta tujuan organisasi sudah berubah atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisasi, perubahan yang dimaksud

adalah perubahan terhadap sistem kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perubahan wewenang, tanggungjawab dan tugas-tugas bagi setiap unsur bagian.

e. Keeping close to the customer

Keeping close to the customer adalah Mempertahankan hubungan dengan pelanggan, kepuasan pelanggan menjadi merupakan target yang ingin dicapai, maka perlu mempertahankan hubungan dengan baik kepada seluruh pelanggan dalam pendidikan dan inilah yang dikembangkan oleh unit public relations.

Penyebab kegagalan intern dalam TQM yaitu masalah sumber daya manusia (SDM). Kelemahan yang lazimnya berupa tidak memadainya kualitas SDM yang tersedia untuk mencapai tingkat kualitas tertentu. Hal ini mungkin saja ditimbulkan karena proses rekrutmen yang kurang baik atau manajemen yang hanya mementingkan biaya pegawai yang murah.

Penyebab kegagalan intern lainnya yaitu faktor cost. Manajemen mengabaikan perhitungan aspek pembiayaan, sehingga pembiayaan TQM melebihi hasil yang bisa diraih. Salah satu implementasi TQM adalah untuk memperbaiki pula posisi keuangan (finance performance).

2.7 Ruang Lingkup Manajemen Mutu Sekolah Dasar

Mewujudkan mutu di Sekolah dasar memiliki tantangan tersendiri bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Seluruh

SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sekolah dasar perlu mengetahui sektor-sektor yang menjadi titik poin untuk menonjolkan mutu pada setiap lembaga pendidikan termasuk sekolah dasar. Dibawah ini akan dipaparkan aspek- aspek yang menjadi daya tawar tinggi yang dianggap ukuran mutu bagi masyarakat pendapat mulyasa yang dikutip oleh Syarbini:

a. Manajemen mutu Peserta Didik

Manajemen mutu Peserta Didik ini berisi penataan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari masuk dan sampai pada keluarnya dari sekolah. Misalnya PPDB dan pola rekrutmen peserta didik baru. Manajemen peserta didik ini bertujuan untuk mengatur berbagai kagiatan dalam bidang kesiswaan baik inkurikuler maupun ekstrakurikuler agara kegiatan pembelajaran disekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.

b. Manajemen mutu Tenaga Pendidikan dan Kependidikan

Yang termasuk dalam tenaga pendidik adalah semua guru di lembaga tersebut dan yang termasuk tenaga kependidikan adalah staf karyawan dilembaga tersebut. Pengaturan menuju pada mutu meliputi perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi, pemberhentian pegawai, kompensasi pegawai dan penilaian kinerja pegawai.

c. Manajemen mutu Kurikulum dan Pembelajaran

Manajemen mutu kurikulum dan pembelajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum. Untuk menjamin efektifitas perkembangan kurikulum dan program pengajaran kepala sekolah bersama dengan jajarannya harus mampu menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan dituangkan kedalam program tahunan, semester dan bulanan yang kemudian wajib dikembangkan oleh guru.

d. Manajemen mutu Keuangan

Komponen utama manajemen keuangan adalah prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelajaran, perundangan dan prosedur pendistribusian, prosedur investasi dan prosedur pemeriksaan.

e. Manajemen mutu Sarana Prasarana

Manajemen mutu sarana dan prasarana berupa kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, perawatan, penyimpanan, inventaris dan penghapusan serta penataan.

f. Manajemen mutu Hubungan Masyarakat

Manajemen mutu hubungan masyarakat bertujuan untuk memajukan kualitas pembelajaran, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

g. Manajemen mutu layanan Khusus

Manajemen mutu layanan khusus meliputi layanan perpustakaan, kesehatan UKS, dan keamanan sekolah serta bimbingan konseling.

BAB III

MUTU PENDIDIKAN DALAM PERSPEPEKTIF PEMBANGUNAN PENDIDIKAN



Dalam perspektif Pembangunan Pendidikan Nasional, pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi maikannusia agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas yang meliputi dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif sosial, pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Dalam perspektif budaya, pendidikan merupakan wahanapenting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos di kalangan wargamasyarakat.

Dalam perspektif politik, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Dalam tiga tahun mendatang, pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup beberapa hal, yaitu:

- a) Pemerataan dan perluasan akses;
- b) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing;
- c) Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan
- d) Peningkatan pembiayaan.

Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan *knowledge-based economy (KBE)*, yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan – *education for the knowledge economy (EKE)*. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan, yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung *KBE*. Ketersediaan manusia bermutu yang menguasai Iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut daya saing tinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam persaingan global. (Ace Suryadi : 1999: 17)

Dalam perspektif ekonomi, sosial, budaya dan politik, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslah merujuk dan

bersumber pada paham ideologi nasional, yang dianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang, pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk *critical mass*, yang menjadi elemen pokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha besar untuk meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanya masyarakat demokratis, yang bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama *civil society*, yang menjadialah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan pembangunan masyarakat demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan nasional, diperlukan suatu reformasi menyeluruh yang telah dimulai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik pemerintahan. Reformasi politik pemerintahan ini ditandai dengan perubahan radikal tata pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik, dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan, sehingga diharapkan dapat

memperbaiki kinerja pendidikan nasional.

Dalam rangka komitmen global yang diarahkan guna mempercepat sasaran Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) yang menyatakan: "Setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas" dan konvensi mengenai hak azasi manusia (HAM) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada pendidikan dasar (Dikdas). Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan" (Deklarasi HAM). Dalam memenuhi komitmen internasional di bidang pendidikan, Pemerintah melakukan perbaikan indikator kinerja PUS, dengan menekankan pada peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Namun, upaya inovatif ini dalam rangka menjamin penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin yang belum memperoleh kesempatan belajar, serta penuntasan buta aksara sebagai salah satu indikator penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia ternyata masih menjadi agenda yang perlu perhatian semua pihak, baik masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan uluran dunia internasional. .

Terkait dengan isu gender juga, ditetapkan pemihakan kebijakan dan disusun program-program pendidikan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Renstra menyusun strategi dalam mengurangi berbagai kendala yang menghambat partisipasi perempuan atau laki-laki untuk memperoleh kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dalam menjalankan misi pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada Dikdas, dibuka peluang yang sebesar-besarnya bagi laki-laki dan perempuan agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi mereka secara optimal dan seimbang. Kebijakan menghapus berbagai kesenjangan gender pada berbagai tingkat pendidikan ini telah mulai diwujudkan melalui *program pengarusutamaan gender (PUG)* sebagai salah satu komitmen Pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan, di samping penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan bebas dari biaya.

Berkaitan dengan komitmen global, Renstra Depdiknas Tahun 2005-2009 juga ditujukan dalam rangka pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pada era global pendidikan hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- (1) Informasi dan kesadaran;
- (2) Sistem pengetahuan;
- (3) Perlindungan dan manajemen lingkungan;
- (4) Perdamaian dan keadilan;
- (5) Keadaan setempat lokal;

- (6) Transformasi;
- (7) Keragaman budaya dan pemahaman lintas budaya;
- (8) Tema-tema, isu-isu lintas sektoral;
- (9) Kesehatan;
- (10) Pendidikan lingkungan, dan
- (11) Kemitraan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, Pemerintah (Depdiknas) membuat strategi perluasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk usia muda yang kurang produktif jumlahnya masih cukup besar. Dalam perspektif pendidikan, masalah-masalah tersebut terjadi sebagai akibat dari masih tingginya angka putus sekolah, terbatasnya akses ke pendidikan dan pelatihan bagi lulusan terutama dari kalangan masyarakat miskin, serta kurang efektifnya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kecakapan hidup.

Permasalahan mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan suatu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Pembahasan dalam hal ini didasarkan pada komponen masukan, proses, dan keluaran. Mutu masukan pendidikan dapat dilihat dari kesiapan murid dalam mendapatkan kesempatan pendidikan. Secara eksternal, komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan meliputi beberapa hal, yakni:

- 1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun

kesejahteraannya;

- 2) prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal;
- 3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran; dan
- 4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif.

BAB IV

KEPALA SEKOLAH DAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN



Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi bangsa. Mutu pendidikan yang baik akan mencetak generasi yang berkualitas dan menjadi kunci untuk membangun dan memperbaiki negara. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya di bidang pendidikan, salah satunya dengan menerbitkan program wajib belajar sejak 2 Mei 1984. Menurut undang-undang tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 18 wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Ada beberapa alat pengukuran yang diterapkan untuk mengukur kualitas pendidikan di tiap negara, salah satunya adalah PISA yang dilakukan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Programme for International Student Assessment (PISA) merupakan survei evaluasi sistem pendidikan di dunia yang mengukur kinerja siswa kelas pendidikan menengah. Hasil pada tahun 2018 yang diumumkan pada bulan Desember 2019 menempatkan siswa Indonesia di jajaran nilai terendah terhadap pengukuran membaca, matematika, dan sains.

Di Indonesia pemerintah telah memberikan acuan agar sekolah di Indonesia memiliki kualitas yang baik, salah satunya adalah dengan menerbitkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap

Lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan guna tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya standar nasional pendidikan diharapkan penerapan kebijakan dalam setiap sekolah menjadi lebih terarah serta dapat pemeratakan standar mutu pendidikan di Indonesia. Namun demikian persoalan yang dihadapi Indonesia adalah kualitas dari setiap sekolah yang masih jauh dari yang diharapkan terutama Indonesia daerah timur.

Pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan evaluasi mutu pendidikan jenjang sekolah dasar yang dilaksanakan periodik setiap tahun.

4.1 Faktor Standarisasi

4.1.1 Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan dan pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Standar nasional pendidikan meliputi beberapa standar yang dijabarkan sebagai berikut.

4.1.2 Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

4.1.3 Standar Isi

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.

4.1.4 Standar Proses

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan [7].

4.1.5 Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik

4.1.6 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaranm sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

4.1.7 Standar Sarana Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria sarana yang wajib dimiliki setiap sekolah meliputi perabot, peralatan

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan.

4.1.8 Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan oleh sekolah adalah kriteria yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat sekolah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah.

4.1.9 Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

4.1.10 Sistem Pendataan Mutu Pendidikan

Pemetaan mutu adalah proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pemetaan mutu pendidikan berfungsi untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan dapat dimanfaatkan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.

Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan pendidikan di negara kita saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan, namun yang terjadi justru kemerosotan mutu pendidikan dasar, menengah, maupun tingkat pendidikan tinggi. Hal ini berlangsung akibat penyelenggaraan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada aspek kuantitas dan kurang dibarengi dengan aspek kualitasnya. Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh peningkatan proses belajar mengajar. Dengan adanya peningkatan proses belajar mengajar dapat meningkatkan pula kualitas lulusannya.

Peningkatan kualitas proses pembelajaran ini akan sangat tergantung pada pengelolaan sekolah dan pengajaran/pendekatan yang diterapkan oleh strategi kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah terbukti mempengaruhi implementasi dan pemeliharaan perubahan dan berkorelasi dengan hasil belajar murid. Kualitas lulusan pendidikan dipengaruhi oleh kualitas manajemen sekolah atau manajemen pengelolaan pendidikan. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh fasilitas pendukung, proses belajar mengajar, dan pengajaran.

Kemampuan sosial ekonomi orang tua siswa yang tinggi akan berkorelasi dengan penyediaan fasilitas belajarnya, yang akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Mutu pendidikan tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal, ada sejumlah variabel yang dianggap saling berhubungan/ mempengaruhi. Hal ini perlu

sebuah kajian yang akan mengidentifikasi secara empirik hubungan langsung atau tidak langsung dalam suatu rangkaian dari sistem pendidikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak pula yang satu lebih penting dari yang lain. Faktor-faktor merupakan suatu sistem, artinya satu sama lain saling mendukung dan saling menguatkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kepala sekolah sebagai pemimpin harus dapat memberdayakan semua komponen tersebut demi peningkatan mutu di sekolah.

4.2 Kepala Sekolah

4.2.1 Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah

Salah satu faktor terpenting yang paling mempengaruhi upaya peningkatan mutu pendidikan adalah strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu di sekolah yang dia pimpin, tidak jarang kepemimpinan kepala sekolah berhadapan dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan berbagai masalah pengelolaan di sekolah, baik yang berhubungan dengan implementasi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, personalia (pegawai dan guru), keuangan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat.

Siagian (2007: 12) menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sebagai keterampilan dan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi setingkat maupun yang lebih rendah dari padanya dalam berpikir dan bertindak agar perilaku yang

semula mungkin individualistik dan egosentris berubah menjadi perilaku organisasional.

Permasalahan tersebut wajar terjadi pada kepala sekolah karena dinamika perubahan yang terjadi di luar dunia pendidikan seperti di bidang informatika dan teknologi lebih pesat dibandingkan di yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Dalam kondisi seperti itu, kepala sekolah memerlukan cara-cara terbaik yang akan diterapkan dalam mengelola sekolah agar tetap efektif mencapai tujuan institusi yang semakin dituntut kualitasnya.

Dalam posisi seperti itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan berbagai cara yang berhubungan dengan upaya meningkatkan mutu di sekolah. Masalah peningkatan mutu di sekolah tidak dapat dilakukan dengan secara cepat, tetapi dalam peningkatan mutu hasil yang baik akan diperoleh dari proses manajemen yang baik dan benar. Itulah sebabnya untuk memperoleh mutu pendidikan yang baik tidak dapat dilakukan melalui kerja instan. Kepala sekolah harus dapat melaksanakan mutu pendidikan dengan cara menggunakan kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan secara sistematis maka cara yang terbaik dimulai dari Sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Karena peningkatan mutu pendidikan di tingkat SD secara strategis akan membawa dampak pada peningkatan mutu pendidikan pada jenjang

selanjutnya. Untuk itu kepala sekolah dituntut untuk mampu merancang langkah-langkah strategis yang akan diterapkan dalam mengelola sekolah. Penyusunan langkah-langkah strategis tersebut melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, bahkan bila perlu masyarakat juga ikut dilibatkan. Setelah langkah-langkah strategis disusun, tahapan berikutnya adalah melaksanakannya bersama-sama warga sekolah.

Dalam menerapkan langkah-langkah strategis peningkatan mutu di sekolah, kepala sekolah dituntut tidak hanya dapat menerapkan atau melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah disusun, karena setelah langkah-langkah strategis dilaksanakan kepala sekolah harus menilai keberhasilannya, dan hasil yang diharapkan adalah adanya peningkatan mutu.

Wahyusumidjo (2005: 118) menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang mempunyai beberapa ciri khas atau kewajiban sebagai berikut :

- a) Kepala sekolah harus tampak sebagai sosok yang dihargai, dipercayai, diteladani, dituruti segala perintahnya. Sehingga kepala sekolah sebagai pemimpin berfungsi sebagai sumber inspirasi bawahan.
- b) Kepala sekolah harus mampu memahami dan memotivasi setiap guru, staf, dan bersikap yang positif dari reaksi yang negatif
- c) Kepala sekolah bertanggung jawab agar para guru, staf dan siswa menyadari akan tujuan sekolah yang ditetapkan,

kesadaran para guru sehingga penuh semangat, keyakinan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan sekolah.

- d) Guru, staf dan siswa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, maka setiap kepala sekolah dapat menyediakan segala fasilitas, peralatan dan berbagai peraturan dan suasana yang mendukung kegiatan.
- e) Kepala sekolah harus selalu dapat memelihara kesinambungan antara guru, staf dan siswa.
- f) Kepala sekolah harus memahami bahwa esensi kepemimpinan adalah kepengikutan (the followership) artinya kepemimpinan tidak akan terjadi apabila tidak didukung bawahan atau pengikutnya.
- g) Kepala sekolah memberikan bimbingan dan mengadakan koordinasi kegiatan atau mengadakan pengendalian dan pengawasan serta pembinaan agar masing-masing bawahan atau anggota memperoleh tugas yang wajar dalam beban hasil usaha bersama.

Untuk itu, budaya mutu harus dikedepankan oleh kepala sekolah beserta segenap jajarannya pada saat langkah-langkah strategis peningkatan mutu diterapkan. Inilah yang dinamai dengan peningkatan mutu, yaitu diawali dengan rencana strategis yang rasional, dilaksanakan secara tim dalam suasana budaya mutu untuk memperoleh mutu terbaik.

4.2.2 Strategi-strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Tahapan-tahapan tersebut tidaklah gampang dilaksanakan oleh kepala sekolah, terutama membentuk budaya mutu dalam bekerja secara tim. Dibutuhkan kepala sekolah yang memiliki sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan fungsi kepala sekolah. Demikian penting peran kepala sekolah, sehingga pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Sekali pun para kepala sekolah (SD) yang ada saat ini ditunjuk belum melalui seleksi yang dipersyaratkan oleh Kepmendiknas no. 13 tahun 2007 tersebut, namun upaya peningkatan mutu pendidikan tetap menjadi tanggung jawab kepala sekolah.

4.2.2.1 Strategi kepala sekolah dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan

Mengajak semua warga sekolah serta bekerja sama dengan komite, para guru dan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan disekolah. Baik itu adalah kegiatan Kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler yang menyangkut peningkatan mutu disekolah.

Komite juga berperan dalam proses perencanaan dengan cara memberikan masukan dan kritikan yang membangun kepada kepala sekolah. Komite menyadari pentingnya peran dalam menyukseskan perencanaan mutu di sekolah.

Komite dan Kepala Sekolah bekerja sama dalam menyusun RAPBS atau RKAS di sekolah. Komite selalu dilibatkandalam perencanaan anggaran di sekolah karena kepala sekolah menyadari pentingnya peran komite sekolah. Kepala sekolah menganggap komite sekolah sebagai rekan dalam kerjasama untuk menyukseskan pelaksanaan peningkatan mutu di sekolah.

Harun (2009: 47) menyatakan : “Peningkatan mutu pendidikan melalui TQM (Total Quality Management) merupakan salah satu cara yang tepat untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas organisasi (sekolah). Konsep pendekatan ini berfokus pada upaya peningkatan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua anggota organisasi”.

Dengan melibatkan semua personil sekolah dalam perencanaan maka mereka merasa bagian dari perencanaan mutu. Dengan ada kesadaran memiliki tanggung jawab tentu dalam pelaksanaan diperkirakan akan dapat berjalan dengan baik. Personil sekolah merupakan unsureutama dalam perencanaan mutu karena merekalah kelak yang akan bekerja dalam meningkatkan mutu disekolah.

Merasa mudah dalam menyusun perencanaan. Kepala sekolah harus dapat membina hubungan yang harmonis dengan bawahan sehingga bawahan merasa senang ketika bertugas. Kepala sekolah harus dapat menjadi pengayom dan contoh bagi personil sekolah yang lain. Dengan ikut serta serta membantu proses perencanaan tentu akan lebih mudah menyukseskan perencanaanpeningkatan mutu disekolah.

Sallis (2010: 211) menyatakan tentang perencanaan mutu pendidikan yang tidak terjadi begitu saja ia harus direncanakan, mutu harus menjadi bagian penting dari strategi institusi dan harus dilihat secara sistematis dengan menggunakan proses perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan salah satu bagian penting dari peningkatan mutu. Tanpa arahan jangka panjang yang jelas sebuah institusi tidak dapat merencanakan peningkatan mutu.

Tanpa arah yang jelas tujuan peningkatan mutu pendidikan sulit tercapai. Perencanaan jangka panjang dengan melihat seluruh aspek dan menyeluruh tentu menjadikan peningkatan mutu dapat terarah. Perencanaan mutu tidak boleh hanyamenfokuskan pada keadaan sekarang namun juga melihat jauh kedepan. Dengan adanya pandangan seperti ini maka peningkatan mutu adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus tanpa henti dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah. Dalam perencanaan mutu kepala sekolah harus dapat memilah mana perencanaan yang didahulukan atau mana yang tidak didahulukan. Karena jika dalam langkah awal perencanaan sudah salah dipastikan yang selanjutnya akan salah. Kepala sekolah memegang posisi sangat strategis dalam perencanaan mutu di sekolah.

4.2.2.2 Strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan

Kepala sekolah juga selalu memberdayakan guru dengan memberi kesempatan kepada guru untuk ikut pelatihan dan

sebagainya. Kepala sekolah juga memberikan wewenang yang lebih luas kepada guru dalam mengajar dikelas.

Menurut Sallis (2010:174) tentang peningkatan mutu fungsi utama pemimpin dalam meningkatkan mutu adalah dengan memberdayakan para guru dan memberi mereka wewenang yang luas untuk meningkatkan pembelajaran para pelajar.

Menurut Guru Masyarakat sekitar sekolah sangat mendukung kegiatan peningkatan mutu disekolah. Para stakeholders yang diwakili oleh komite sangat mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan disekolah. Dengan ikut sertanya masyarakat dalam membimbing dan mendorong anaknya dalam belajar maka pelaksanaan peningkatan mutu di sekolah akan lebih berhasil..

Menurut Idris (2005: 91) menyatakan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi, jika prestasi belajar siswa. Menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam hasil tes kemampuan akademik berupa nilai ulangan umum seperti Ujian Akhir Nasional (UAN)”.

4.2.2.3 Strategi kepala sekolah dalam pengawasan peningkatan mutu pendidikan

Pengawasan dilakukan dalam setiap aspek yang dianggap berhubungan dengan peningkatan mutu disekolah. Kepala sekolah menyadari bahwa pengawasan berperan sangat penting dalam menyukkseskan mutu pendidikan di sekolah. Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan tapi

untuk sama-sama menemukan kekurangan yang ada kemudian mencari solusi dalam menyelesaikan masalah.

Upaya pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru sangat menentukan karena guru adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pendidikan disekolah. Menurut Sahertian (2008: 25) mengemukakan bahwa pengawas berfungsi membantu (*assisting*), memberi dukungan (*supporting*), dan mengajak (*sharing*).

Kepala sekolah ketika jam pelajaran berkeliling keseluruh kelas untuk melihat proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk melihat keaktifan proses belajar mengajar. Kepala sekolah ketika melakukan pengawasan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Dengan sering berkeliling sekolah, kepala sekolah dapat mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Mengetahui mana kelas yang kosong dan tidak sehingga ketertiban sekolah terjaga dengan baik. Kepala sekolah juga melakukan supervisi pengajaran terhadap para guru. Kepala sekolah juga mewawancarai para guru mengenai proses kegiatan belajar mengajar. Jika ada masalah kepala sekolah segera memberikan solusi kepada para guru. Kepala sekolah selalumengingatkan para guru bahwa supervisi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan guru ataumengkritik guru namun dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Satori (2006: 6) menyatakan supervisi akademik atau yang lebih dikenal dengan supervisi pengajaran “menjunjung

tinggi praktik perbaikan mutu secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*)” sebagai salah satu prinsip dasar dari manajemen mutu terpadu.

Kepala Sekolah SD dalam melakukan supervisi pengajaran teknik yang yang digunakan ada dua macam teknik supervisi yang pertama adalah teknik perorangan seperti : kunjungan kelas, observasi kelas, dan percakapan pribadi sedangkan teknik kedua teknik kelompok, seperti mengadakan rapat atau diskusi kelompok, penataran dan lain-lain. Dengan menggunakan teknik seperti diatas kepala sekolah yakin program peningkatan mutu disekolah akan dapat berhasil dengan baik.

Pelaksanaan supervisi dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kepala sekolah dalam melakukan supervisi melihat semua aspek secara menyeluruh dan mendalam setelah itu baru melakukan supervisi. Teknik supervisi juga tergantung dengan kondisi guru yang mengajar. Supervisi dilakukan ada dalam kisaran minggu dan ada juga dalam kisaran bulanan tergantung dengan keadaan di sekolah.

Kepala sekolah menyatakan jika dalam supervisi atau pengawasan ditemukan kendala yang tidak dapat diatasi oleh kepala sekolah, maka kepala sekolah akan mencari masukan dari atasannya. Kepala sekolah jika mendapat kesulitan disekolah selalu meminta arahan kepada atasannya kemudian solusi tersebut dilaksanakan di sekolah oleh kepala sekolah.

Kepala sekolah juga bertanya kepada guru dan siswa tentang sesuatu kendala yang dihadapi dalam PBM. Kepala sekolah hanya sebentar saja masuk kedalam kelas sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Adakalanya kepala sekolah duduk dibangku belakang yang kosong kemudian menyimak proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Kepala sekolah memperhatikan bagaimana cara guru mengajar dan respon siswa. Kepala sekolah juga memperhatikan bagaimana cara guru menjelaskan apakah sesuai dengan kurikulum atau tidak. Kepala sekolah juga menilai kemampuan guru dalam mengelola kelas.

Kepala sekolah setelah mengadakan pengawasan kemudian memanggil guru yang bersangkutan untuk melakukan percakapan pribadi. Adakalanya jika masalah yang ditemukan agak umum digunakan teknik kelompok yaitu mengadakan rapat. Menurut guru setelah pengawasan kepala sekolah segera menindaklanjuti yaitu dengan melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap guru sehingga tidak melakukan kesalahan lagi.

Purwanto (2009: 89) menyebutkan supervisi pengajaran adalah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi baik personel maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan.

Dengan melihat pengertian diatas diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh supervisi pengajaran adalah untuk

memperbaiki kondisi pembelajaran yang ada disekolah. Yang patut diketahui guru sebagai manusia biasa yang bisa saja berbuat salah sangat memerlukan perbaikan atas kekurangan yang guru lakukan. Disinilah pentingnya dilakukan supervisi pengajaran kepada para guru. Dengan adanya supervisi pengajaran diharapkan para guru akan terbantu dalam proses pembelajaran siswa dikelas. Dan yang patut dicatat supervisi pengajaran adalah bantuan kepada guru dan bukan merupakan tempat mencari kesalahan paraguru.

BAB V
MUTU DAN KUALITAS
PENDIDIKAN TERHADAP MURID



5.1 Efek Tinggi atau Rendahnya Mutu dan Kualitas Pendidikan

Mutu dan kualitas pendidikan merupakan suatu tujuan penting dalam pendidikan. Mutu atau kualitas pendidikan merupakan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau kemajuan, karena kualitas mengandung bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Sebagai suatu tujuan pendidikan tentunya mutu dan kualitas pendidikan ini haruslah memiliki kualitas yang baik dan memiliki daya saing sehingga mampu mencapai suatu keberhasilan. Menurut Ace Suryadi dan H.A.R, Tilaar kualitas pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.

Di era globalisasi sekarang ini, mutu dan kualitas pendidikan dituntut untuk lebih meningkatkan level atau standar kemampuan sumberdaya peserta didik untuk memiliki kompetensi yang baik sehingga mampu bersaing. Oleh karena itu kualitas pendidikan harus mencapai taraf baik atau tinggi. Untuk mencapai mutu dan kualitas pendidikan yang kompeten ini tidak dapat tercapai jika hanya satu pihak saja yang melakukan tetapi semua pihak baik dari lingkungan formal yaitu sekolah maupun lingkungan informal yaitu keluarga dan masyarakat harus ikut serta berpartisipasi agar tercapainya mutu dan kualitas pendidikan yang baik.

5.2 Pengertian Standarnisasi Pendidikan

Menurut BSNP, Standarnisasi pendidikan ialah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Indonesia terdiri dari: SKL (Standar Kompetensi Lulusan), Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan. Saat ini pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan standarnisasi pendidikan agar dapat membuat kualitas pendidikan di Indonesia semakin membaik.

Masih banyak sekali kualitas atau mutu pendidikan di jenjang sekolah dasar yang masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan tersebut. Misalnya mahalnya biaya pendidikan, kurangnya kopetensi pendidik, kurangnya daya serap peserta didik, kurang kerjasamanya antara sekolah dan lingkungan keluarga, dan lain sebagainya. Dari beberapa faktor tersebut tentu akan mempengaruhi tingkat kualitas suatu pendidikan dan nantinya akan berpengaruh terhadap pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan akan hal tersebut. Seperti Tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*" maka dari itu sudah semestinya tugas negara untuk menjamin akan hal tersebut.

Mutu dan kualitas pendidikan harus ditanamkan dengan baik sejak dalam tingkat jenjang pendidikan sekolah dasar. Memang jika dilihat secara kilas, banyak anggapan mengenai jenjang tersebut masih dapat dikatakan jenjang yang paling dasar dan tidak perlu memiliki standar kualitas yang kompeten. Karena jenjang tersebut tidak akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan tinggi atau bahkan dunia luar. Namun anggapan tersebut merupakan kesalahan besar dan fatal. Mutu dan kualitas pendidikan yang baik dan berkompeten harus ditanamkan, diajarkan, dan direalisasikan sejak dini. Yaitu sejak peserta didik berada pada jenjang sekolah dasar. Karena pada jenjang ini merupakan awal atau pondasi setiap pengetahuan pendidikan yang didapat. Oleh karena itu mutu dan kualitas pendidikan dijenjang sekolah dasar haruslah memiliki standar kualitas yang baik dan kompeten. Sehingga peserta didik memiliki bekal yang baik untuk nantinya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kualitas pendidikan mengantarkan peserta didik untuk dapat menempuh pendidikan selanjutnya dengan mudah dan mampu mengikuti setiap proses pembelajaran dengan baik. Kualitas pendidikan yang baik akan tercipta dari dukungan dari seluruh pihak yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan kata lain kualitas pendidikan mencakup seluruh peran yang ada. Keberhasilan kualitas dan mutu pendidikan dapat dilihat hasilnya dari capaian atau kualitas yang didapatkan.

Rendahnya kualitas dan mutu pendidikan masih banyak terjadi di sekolah-sekolah dasar karena banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu;

- 1) Pendidik/Guru, pendidik memiliki peran vital terhadap kualitas pendidikan. Semua masukan yang terjadi di dalam pendidikan dalam kegiatan belajar-mengajar dimulai dari guru, jika guru mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik serta memiliki kreatifitas daya tarik, juga kompetensi yang baik pula secara terstruktur pendidik akan mengikuti setiap pembelajaran dari pendidik dengan baik dan kondusif. Namun berlaku kebalikan, jika pendidik melaksanakan dengan tidak baik maka peserta didik pula akan menghasilkan kualitas yang rendah pula.
- 2) Pemerintah dan Sistem Pendidikan, Pemerintah juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di jenjang Sekolah Dasar. Pemerintah menjadi penanggung jawab penuh terhadap terselenggaranya pendidikan Sekolah Dasar. Program yang dibuat oleh pemerintah akan diterapkan dalam pendidikan Sekolah Dasar.
- 3) Sarana dan Prasarana yang tersedia. Dalam era modern gobalisasi ini, Semua Lembaga Pendidikan dituntut untuk menggunakan Tehnologi, Informasi, dan Komunikasi dengan baik agar tercipta keefektifitasan. Namun kendala terjadi dijenjang Sekolah Dasar, masih ada sebagian Sekolah Dasar yang belum memiliki sarana prasarana

tersebut dan belum mampu untuk menggunakannya dengan baik.

- 4) Biaya Pendidikan. Sesuai Tujuan Pendidikan Nasional Pemerintah memang memberikan anggaran biaya pendidikan kepada Sekolah Dasar dalam bentuk Dana BOS. Namun faktanya bantuan tersebut tidak mampu untuk menutupi seluruh kegiatan yang berlangsung dalam Sekolah. Untuk itu dengan keterbatasannya Sekolah Dasar hanya mampu mengoptimalkan dana tersebut sehingga kualitas pendidikan kurang maksimal.
- 5) Orang Tua dan Masyarakat. Orang tua biasanya hanya menyerahkan anaknya secara keseluruhan kepada pihak sekolah namun ketika di rumah orang tua tidak memberikan pengajaran di rumah. Padahal waktu yang tersedia lebih banyak berada dalam lingkungan keluarga dan Masyarakat dari pada berada di sekolah. Tanpa ada kerja sama antara pihak sekolah dan masyarakat tersebut membuat kualitas pendidikan jenjang Sekolah Dasar menjadi kurang maksimal.
- 6) Siswa/Peserta Didik. Obyek utama dari pendidikan adalah Siswa/Peserta didik, peserta didik menjadi standar atau acuan untuk menilai kualitas pendidikan. Jika peserta didik tidak memiliki rasa ingin belajar yang tinggi, peserta didik tersebut akan cenderung untuk seenaknya dalam mengikuti pembelajaran kelas.

Sekolah Dasar memang jenjang pendidikan yang paling awal atau dasar, namun kualitas dan mutu pendidikan pada jenjang ini akan sangat berpengaruh terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau selanjutnya yaitu SMP/MTs. Jika kualitas dan mutu pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar tergolong rendah, hal tersebut akan membuat peserta didik untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun sebaliknya jika kualitas dan mutu pendidikan Sekolah Dasar baik akan memudahkan dalam proses melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya SMP/MTs akan menerima peserta didik berdasarkan melihat kualitas dan mutu pendidikan Sekolah Dasarnya. Kemudian dengan seleksi- seleksi yang tidak mudah dan ketat. Jika peserta didik dibekali dengan kualitas dan mutu pendidikan yang baik, hal ini akan memudahkan peserta didik dalam mengikutinya. Namun sebaliknya jika peserta didik dibekali dengan kualitas dan mutu pendidikan yang rendah, hal tersebut akan dirasa berat oleh peserta didik untuk melaluinya. Pengaruh utama dari rendahnya kualitas dan mutu pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar adalah tidak mampunya peserta didik mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dengan baik. Hal ini akan menyebabkan ketertinggalan pemahaman pembelajaran antara peserta didik satu dengan lainnya. Dan proses pembelajaran kelas akan terhambat.

5.3 Kultur Sekolah dalam Peningkatan Mutu dan Kualitas

Saat ini pendidikan di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal. Tantangan

internal antara lain terkait dengan bagaimana sekolah dapat meningkatkan kualitasnya secara terus menerus (*continuous improvement*) dan bagaimana sekolah membangun kultur sekolah (*school culture*) dengan melibatkan seluruh komponen/warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, tenaga pendidikan lainnya) untuk menjaga eksistensi sekolah di tengah iklim persaingan yang kian kompetitif. Selain itu, dalam konteks sekolahpun seringkali muncul permasalahan yang menyangkut visi dan misi pimpinan sekolah yang tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh seluruh warga sekolah. Sedangkan tantangan eksternal terkait dengan bagaimana sekolah membangun relasi dan kemitraan dengan institusi lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Suyata (2000), pendidikan merupakan pemrosesan majemuk yang melibatkan sejumlah institusi yaitu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pusat- pusat pendidikan seperti keluarga, masyarakat, sekolah bahkan universitas telah mengalami banyak kehilangan (*missing*) antara lain (Suyata, 2000): *sense of identity*, *sense of humanity*, *sense of community*, dan *sense of culture (values)*. Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan mengemban peran yang kian berat, salah satunya karena adanya tuntutan peningkatan kualitas, sekaligus mengemban peran penjaga nilai moral dan budaya. Untuk mengembangkan sekolah berkualitas, sekolah perlu menjalin relasi dan kemitraan dengan pihak lain untuk berpartisipasi mewujudkannya. Dukungan orang tua

perlu, tetapi tidak cukup kuat, sehingga perlu mencari dukungan yang lain melalui aliansi edukatif, termasuk kerjasama/sinergi antar sekolah maupun sinergi sekolah dengan institusi lain. Untuk menjadi baik, sekolah memerlukan dukungan dari orang tua murid dan masyarakat kitaran sekolah.

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan merupakan proses pemanusiaan dan menyiapkan manusia untuk menghadapi tantangan hidup. Tanpa bermaksud mengecilkan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang telah dilakukan, dalam kenyataannya memang banyak pembenahan yang harus dilakukan. Dalam kaitannya dengan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah, sekurang-kurangnya terdapat lima aspek pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) proses belajar mengajar,
- 2) kepemimpinan sekolah,
- 3) manajemen sekolah,
- 4) sarana dan prasarana, dan
- 5) kultur sekolah (Depdikbud, 1999:10).

Empat aspek pertama sudah banyak menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak yang peduli pada upaya perbaikan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. Namun faktor kultur sekolah kiranya belum banyak digunakan sebagai faktor yang menentukan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah.

Usaha peningkatan mutu pendidikan di sekolah selama ini cenderung menggunakan pendekatan struktural dengan menekankan pada aspek teknis-administratif (*format oriented*), bukannya pada *goal oriented* yang lebih mengacu pada pendekatan kultural karena menyangkut *values*. Padahal peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar tidak dapat dilepaskan dari basis kultur sekolah. Dengan basis kultur tersebut, Kepala Sekolah, guru, siswa, dan orang tua akan merasa memiliki (*sense of belonging*), sehingga akan memelihara, meningkatkan, dan mengupayakan terwujudnya peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Perkembangan masyarakat yang telah memasuki abad teknologi informasi menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional. Hal tersebut berimplikasi juga pada semakin menguatnya tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, yang meliputi guru profesional yang memiliki peran meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pada era sekarang, sekolah dituntut untuk berperan sebagai institusi pendidikan yang mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi kompetisi masa depan. Dalam memerankan fungsi tersebut, sekolah tidak dapat mengelak untuk senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah.

Perbaikan sekolah dipengaruhi oleh: tujuan bersama (*shared goals*), tanggung jawab akan kesuksesan (*responsibility for success*), kolegal (*collegiality*), perbaikan terus menerus (*continous improvement*), pembelajaran sepanjang waktu (*life*

long learning), mengambil resiko (*risk taking*), dukungan (*support*), saling menghormati (*mutual respect*), keterbukaan (*openness*), perayaan dan humor (*celebration and humor*). Menurut John Goodlad, sekolah bermutu dan kurang bermutu berbeda dalam kultur dan kesadaran kultur mereka. Kultur sangat dekat dengan persoalan kepemimpinan. Perbaikan sekolah memerlukan dasar kultur dan perilaku kepemimpinan yang cocok dengan agenda mutu tersebut (Farida Hanum, 2010).

Dalam upaya peningkatan kualitas sekolah, dapat digunakan pendekatan kebudayaan yang terkait dengan sejumlah aktivitas yang mendukung, seperti yang diungkapkan oleh M. Sastrapratedja (2001) berikut ini:

1. Pembentukan tim kerja dari berbagai unsur dan jenjang untuk saling berdialog dan bernegosiasi.
2. Berorientasi pada pengembangan visi dan bukannya berfokus pada defisiensi. Jika model defisit terlalu menekankan kekurangan dan permasalahan dalam suatu institusi, maka pendekatan visioner menekankan pandangan kolektif mengenai hal-hal yang ideal.
3. Hubungan kolegal untuk memperkuat identitas kelompok, bersama-sama bertanggungjawab, dan saling mendukung.
4. Kepercayaan dan dukungan sebagai bagian dari modal sosial (*social capital*) adalah esensial bagi bekerjanya suatu institusi.
5. Nilai dan kepentingan bersama, bukannya kekuasaan

dan kedudukan adalah esensial untuk mendamaikan berbagai kepentingan yang ada.

6. Akses pada informasi merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan institusi dan perbaikan kinerja.
7. Pertumbuhan sepanjang hidup merupakan kesempatan yang perlu disediakan bagi seluruh warga institusi untuk mengembangkan diri dan menjadi profesional.

Usaha peningkatan kualitas sekolah harus disertai dengan sosialisasi akan kewajiban setiap warga sekolah dalam mengembangkan diri sehingga dapat menghasilkan kinerja yang profesional.

Menurut M. Sastrapratedja (2001), budaya adalah pikiran, kata-kata, sikap, perbuatan, dan hati setiap warga. Dalam konteks sekolah, budaya/kultur sekolah merupakan pikiran, kata-kata, sikap, perbuatan, dan hati setiap warga di sekolah. Sedangkan menurut Vembriarto (1993), kebudayaan sekolah ialah *a complex set of beliefs, values and traditions, ways of thinking and behaving* yang membedakannya dari institusi-institusi lainnya.

Institusi pendidikan, terutama sekolah semestinya dalam kapasitas tertentu dapat mengambil alih fungsi-fungsi transmisi nilai dalam keluarga dan masyarakat. Tentu saja, fungsi tersebut tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada sekolah, karena adanya berbagai keterbatasan yang ada (Sairin, 2003:8). Sebagaimana halnya dengan keluarga dan institusi sosial

lainnya, sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi proses sosialisasi dan berfungsi mewariskan kebudayaan masyarakat kepada anak. Sekolah merupakan sistem sosial yang mempunyai organisasi yang unik dan pola relasi sosial di antara para anggotanya yang bersifat unik pula. Hal itu disebut kebudayaan sekolah. Namun, untuk mewujudkannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Sekolah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti keluarga dan masyarakat untuk merumuskan pola kultur sekolah yang dapat menjembatani kepentingan transmisi nilai.

Apa yang dihayati oleh siswa itu (sikap dalam belajar, sikap terhadap kewibawaan, sikap terhadap nilai-nilai) tidak berasal dari kurikulum sekolah yang bersifat formal, melainkan dari kebudayaan sekolah itu. J. Coleman terhadap sejumlah sekolah menengah di Amerika menunjukkan bahwa siswa-siswa di sekolah tersebut lebih menghargai prestasi olahraga, kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, dan kepopuleran daripada prestasi akademik. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Wilson pada beberapa sekolah menengah menunjukkan bahwa *ethos* sesuatu sekolah mempengaruhi prestasi akademik dan aspirasi para siswas mengenai pekerjaan (Vembriarto, 1993:82).

Sistem pendidikan mengembangkan pola kelakuan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari murid-murid. Kehidupan di sekolah serta norma-norma yang berlaku di situ dapat disebut kebudayaan sekolah. Walaupun kebudayaan sekolah merupakan bagian dari

kebudayaan masyarakat luas, namun mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai suatu *subculture* (Nasution, 1999:64). Sekolah bertugas untuk menyampaikan kebudayaan kepadagenerasi baru dank arena itu harus selalu memperhatikan masyarakat dan kebudayaan umum. Akan tetapi di sekolah itu sendiri timbul pola-pola kelakuan tertentu. Ini mungkin karena sekolah mempunyai kedudukan yang agak terpisah dari arus umum kebudayaan.

Sekolah berkualitas seringkali juga diorientasikan sebagai sekolah yang baik (*good school*) atau sekolah efektif (*effective school*). Konsep-konsep itu seringkali digunakan dengan maksud yang sama. Menurut Mortimore, sekolah yang efektif dapat didefinisikan sebagai: *one which students progress further than might be expected from a consideration of intake* (Suyanto, 2007). Berdasarkan rumusan tersebut, sekolah memiliki tugas penting, tidak saja mendukung tercapainya prestasi akademik siswa, melainkan juga menjaga agar semua siswa dapat berkembang sejauh mungkin jika dibandingkan dengan kondisi awal ketika mereka baru memasuki sekolah. Pada sekolah yang efektif, semua siswa dijamin dapat berkembang.

Sebaliknya, pada sekolah yang tidak efektif, hanya siswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam belajar (*fast learner*) yang dapat berkembang.

Mortimore menjelaskan bahwa sekolah yang efektif dapat didefinisikan sebagai: *one which students progress further than might be expected from a consideration of intake* (Suyanto, 2007). Berdasarkan rumusan tersebut, sekolah memiliki tugas penting, tidak saja mendukung tercapainya prestasi akademik siswa, melainkan juga menjaga agar semua siswa dapat berkembang sejauh mungkin jika dibandingkan dengan kondisi awal ketika mereka baru memasuki sekolah. Pada sekolah yang efektif, semua siswa dijamin dapat berkembang. Sebaliknya, pada sekolah yang tidak efektif, hanya siswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam belajar (*fast learner*) yang dapat berkembang.

Sekolah efektif juga identik dengan sekolah sukses atau sekolah yang baik (*good school*). Seperti disebutkan dalam salah satu bagian dari tulisannya tentang “*What makes a good school?*” Bonnor & Caro (2012) menuliskan tentang bagi siapa sesungguhnya sekolah yang baik itu (*Who are good schools for?*). Mereka menyebutkan bahwa sekolah yang baik ditujukan tidak semata-mata bagi siswa (*students*), melainkan juga ditujukan kepada orang tua (*parents*), guru (*teachers*), dan negara (*nation*). Di sinilah esensi penting dari peningkatan kualitas pendidikan sekolah, karena sesungguhnya muaranya adalah mengembangkan warga negara yang kreatif menghadapi berbagai tantangan. Basis kultur sekolah dapat dimanfaatkan

secara optimal karena lebih menjamin terjadinya perubahan yang lebih fondasional karena menyangkut nilai-nilai(*values*).

Pengembangan Mutu Pendidikan di Sekolah melalui Kultur Sekolah perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:

- a) nilai, keyakinan, visi, misi,
- b) kurikulum,
- c) interaksi warga sekolah,
- d) sarana dan prasarana,
- e) artefak.

Usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan sekolah selama ini telah dilakukan di berbagai sekolah. Peningkatan mutu sekolah terkait dengan berbagai dimensi, seperti: dimensi kepala sekolah, dimensi guru, dimensi siswa, dimensi orang tua siswa, dan dimensi stakeholders. Dimensi yang menyangkut kepala sekolah, umumnya sudah ditunjukkan melalui upaya mewujudkan kepemimpinan yang kokoh, dimana kepala sekolah tidak bertindak sebagai “bos”.

Kepemimpinan dengan tipe “bos” atau manajer lebih melihat segala keputusan yang diambil dan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah lebih bersifat struktural. Sifat struktural ini kepala sekolah bertindak sebagai orang yang memiliki peran yang paling tinggi dan dominan di sekolah. Sifat ini menimbulkan iklim akademik yang kurang kondusif.

Sifat kepala sekolah yang ditunjukkan oleh sekolah-sekolah yang diteliti sudah cenderung lebih berperan sebagai leader, bukan sebagai manager. Dengan demikian sekolah sudah berusaha membangun aspek kultural, karena leader bersifat

kultural. Dimensi yang menyangkut guru, sudah ada upaya perbaikan proses pembelajaran di kelas, namun masih belum optimal karena pendekatan guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa masih berbasis kelas, belum mendasarkan diri pada aspek mendidik seseorang (siswa) yang kebetulan hadirnya berwujud kelompok (kelas). Mendidik dalam arti proses adalah aktivitas mendidik seseorang sekaligus mendidik diri sendiri (guru). Dengan demikian, demi keberhasilan aktivitas mendidik anak (siswa), guru mutlak harus menjadi contoh atau menjadi teladan bagi siswa. Para siswa melihat guru sebagai pendidik dalam kehidupan nyata, sehingga siswa lebih mengikuti apa yang dilakukan guru dari pada apa yang dikatakannya.

Aspek yang sangat memprihatinkan di semua sekolah adalah adanya aspek yang fundamental yang belum terwujud dalam pribadi anak, yaitu jujur. Jujur adalah salah satu inti pilar akhlak, pilar karakter, pilar budaya sekolah yang sangat penting. Berdasarkan hasil dialog dengan para guru terungkap bahwa di setiap kelas masih ada anak yang kehilangan uang di kelas. Hal ini membuktikan bahwa nilai kejujuran belum tertanam dan mengejawantah dalam kepribadian anak. Anak belum memiliki empati betapa sedihnya teman yang kehilangan uang, apalagi empati bahwa orang tua temannya itu harus bekerja untuk mendapatkan uang itu.

Nilai itu mempunyai sifat yang senantiasa terpadu dalam diri seseorang, atau tak terceraikan dari diri seseorang, karena mengejawantah dalam diri seseorang. Orang yang jujur di manapun pasti jujur, jika jujur sudah menjadi nilai yang

dimilikinya. Semua guru untuk menanamkan nilai kejujuran sampai menyentuh “*feeling*” anak (moral feeling) yang pada gilirannya dilakukan secara nyata dalam kehidupan di sekolah dan di rumah serta dalam komunitas yang lebih luas (masyarakat). Jujur dapat ditanamkan melalui cerita atau kisah-kisah sejati yang dapat merasuk ke dalam hati anak (siswa). Salah satu kendala penanaman nilai adalah belum satunya kata dengan perbuatan oleh semua guru atau dengan kata lain belum ada kekompakan yang kokoh bagi semua guru. Nilai-nilai inti lain yang sudah dicoba ditanamkan kepada para siswa adalah disiplin, tanggung jawab, sabar, rendah hati dan toleransi. Namun hasil dari penanaman nilai-nilai ini belum optimal.

Aspek akademik yang belum dilaksanakan oleh para guru dalam peningkatan mutu pendidikan kelas atau sekolah adalah kenyataan bahwa para guru setelah menerangkan mata pelajaran terbiasa bertanya kepada para siswa dengan ungkapan “Anak-anak sudah jelas apa belum?”. Ungkapan tersebut sangat lazim sampai sekarang. Padahal ungkapan ini tidak tepat. Anak-anak itu abstrak, tidak konkrit. Ada sepuluh orang anak yang mengatakan jelas dengan keras, sudah gemuruh suara di kelas tersebut. Itulah anak-anak yang nanti pada akhirnya mendapat nilai-nilai terbaik di kelasnya, yang jumlahnya kurang lebih hanya sepuluh orang. Dengan jawaban gemuruh tadi guru mengira semua anak sudah jelas padahal kenyataannya hanya sebagian kecil saja yang jelas. Aspek sosio-akademik yang juga diabaikan oleh guru adalah bahwa setiap anak sangat rindu dipanggil namanya oleh guru, kendati satu jam tatap muka

masing-masing anak tidak mungkin akan memperoleh kesempatan ditanya semuanya oleh guru. Namun pada kesempatan-kesempatan lain para siswa akan mendapat giliran ditanya oleh guru.

Guru yang bertanya kepada siswa yang disebut namanya itu memiliki keuntungan bagi guru yaitu mengetahui seberapa jauh seseorang yang ditanya menguasai materi yang baru diterangkan atau ditransformasikan oleh guru. Guru memperoleh "*classroom mapping*" sebagian dari pencapaian belajar anak dalam kelas tertentu. Hal yang belum dilakukan oleh para guru ini akan memudahkan guru dalam memberikan perlakuan dalam upaya mencapai target pencapaian prestasi siswa di kelas yang terkait dalam periode pembelajaran yang dirancang, sehingga pada akhir semester siswa mencapai prestasi yang relatif sama tingginya. Aktivitas guru ini dalam lingkup sekolah akan memudahkan kepala sekolah dalam merumuskan "*school mapping*" terhadap penguasaan siswa dalam berbagai mata pelajaran di sekolah. Selanjutnya kepala sekolah perlu berdialog dengan para guru untuk merancang program-program perbaikan untuk peningkatan mutu prestasi siswa di sekolah. Hal ini yang perlu dilakukan oleh para kepala sekolah.

Siswa sebagai salah satu dimensi, bahkan sebagai pusat upaya peningkatan mutu pendidikan, masih ada keragaman kadar tanggung jawab akademiknya. Ada beberapa siswa yang sering tidak mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah) yang ditugaskan oleh guru. Para guru sudah memberi sanksi bagi

yang tidak mengerjakan PR, namun belum berhasil, karena siswa sekali mengerjakan selanjutnya tidak mengerjakan lagi. Hal ini perlu dicari jalan keluarnya sehingga tertanamkan pada diri siswa semangat akademik (semangat belajar) yang tumbuh dari dalam diri para siswa. Hakikat proses pembelajaran yang mendidik pada hakikatnya adalah menjadikan siswa merasa penting melakukan belajar secara kontinyu dimana keinginan itu tumbuh dari dalam diri para siswa itu sendiri. Kegiatan kunjungan guru ke rumah siswa ini akan semakin membangun komunikasi antara siswa dan guru, antara rumah dan sekolah, yang memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Tidak ada sekolah yang sukses dan sekolah yang efektif tanpa mendapat dukungan dari orang tua. Dimensi orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan faktor yang sangat penting pula. Dialog antara orang tua dan guru yang terkait dengan persoalan belajar siswa akan memberikan dukungan penting bagi sekolah dalam menyusun upaya-upaya perbaikan mutu pendidikan sekolah. Ini akan diperkokoh dengan berbagai dukungan dan masukan dari *stakeholders* sehingga semua pihak dapat mendukung komunitas sekolah dalam memperbaiki pendidikan sekolah semakin kuat.

Visi sekolah yang merupakan serangkaian nilai-nilai yang dirindukan oleh semua komunitas sekolah harus senantiasa mengiang-ngiang pada semua anggota komunitas sekolah untuk berusaha mewujudkannya. Namun dalam kenyataan di lapangan para guru seringkali tidak hafal, sehingga kurang dapat

menangkap esensi visi sekolah masing-masing. Visi hendaknya dirumuskan sesingkat mungkin, yang bersifat inklusif. Visi yang akan diwujudkan dengan misi sekolah itu benar-benar yang diimpikan oleh semua komunitas sekolah. Pencapaian visi itu sangat didukung oleh peran fundamental budaya sekolah.

Sekolah tidak pernah bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari pihak lain. Upaya perbaikan sekolah selalu dalam proses, tidak pernah selesai. Sekolah yang baik adalah sekolah yang senantiasa berusaha menjadi sekolah yang lebih baik. Murid tidak melihat apa yang dikatakan, tetapi melihat apa yang dilakukan oleh guru. Menanamkan nilai dapat dilakukan melalui cerita atau kisah. Melalui sentuhan nilai tersebut, biasanya justru lebih berhasil menanamkan nilai-nilai positif. Tipe-tipe guru yang sangat dirindukan oleh muridnya, biasanya kelak masih terngiang-ngiang walaupun siswa telah lulus. Menanamkan nilai melalui kisah atau cerita tentang nilai-nilai tertentu tidak hanya diberi pengetahuan supaya sekedar tahu, tetapi perlu *moral feeling*, dan *moral action*. Aspek-aspek yang merupakan keunggulan sekolah, bisa jadi sama dengan sekolah lain. Keunggulan yang dimaksud dapat meliputi keunggulan akademik dan non akademik. Dalam konteks sekolah sebagai komunitas, mestinya antar sekolah bisa saling belajar, saling mendukung, dan saling melengkapi. Sharing kelebihan masing-masing sekolah (kerjasama dan kolaborasi). Namun, iklim kompetitif yang selama ini dikembangkan dalam relasi antar sekolah kiranya perlu direnungkan, supaya ke depan kompetisi yang dikembangkan lebih bersifat kompetisi kolaboratif dan partisipatoris

BAB VI
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN



Penerapan manajemen strategi di sekolah yaitu menjalankan kiat dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara efektif, yang mengarahkannya pada tujuan strategi sekolah. Menurut Sagala (2013:128) penerapan manajemen strategi di dunia pendidikan yaitu “menggunakan konsep strategi untuk lebih mengefektifkan pengelolaan sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan pendidikan”.

Berdasarkan teori manajemen strategi, dalam mewujudkan sekolah bermutu di tiga sekolah yang menjadi subjek penelitian meliputi perumusan visi, misi menentukan tujuan yang ingin di capai. Visi sekolah menurut Sagala (2013:134) adalah sebuah agenda tujuan sebagai prestasi yang harus di capai dalam aktifitas sekolah. Bagi sekolah, Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang di inginkan di masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa mendatang. Dalam menentukan visi tersebut, sekolah harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan. Visi dan misi merupakan elemen yang sangat penting dalam sekolah, dimana visi dan misi digunakan agar dalam operasionalnya bergerak pada track yang diamanatkan oleh para stakeholder dan berharap mencapai kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumen dari tiga sekolah tersebut sudah mempunyai visi dan misi. Ada yang disusun sekolah dan ada yang disusun yayasan. Dengan adanya visi dan misi, dijadikan

sebagai sasaran untuk pengembangan sekolah. Semua kegiatan-kegiatan diorientasikan kepada visi dan misi. Namun visi dan misi terkadang hanya ada sebagai pelengkap administrasi dalam suatu sekolah. Tidak sepenuhnya dihidupi oleh tiap warga sekolah.

Menurut Sanjaya, (2007:126) dalam dunia pendidikan , strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan Kemp (1995) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa, agar tujuan pembelajaran dapat di capai secara efektif dan efisien. Dari pendapat tersebut, Dick and Carey (1985) juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu pemberian materi dan prosedur pembelajaran yang di gunakan secara bersamaan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan (rangkaiian kegiatan) yang termasuk juga penggunaan metode dan pemamfaatan berbagai macam media pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya di sini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajarn, pemamfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Dalam pengertian ini guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-

alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal.

6.1 Implementasi strategi peningkatan mutu pembelajaran

Hunger & Wheelen (2003:17) menjelaskan bahwa implementasi strategi adalah proses di mana manajemen puncak dalam hal ini kepala sekolah mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input. Seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasiwaktu, sumber/bahan/alat belajar. Oleh karena itu, setiap guru harus mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan, Lampiran Butir B point 5 bahwa “Setiap guru bertanggung jawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP”. Setiap guru juga harus menyusun RPP secara lengkap dan sistematis yang mengacu pada silabus, menyusun program pembelajaran, menyusun kalender pendidikan, dan menyusun pelaksanaan pembelajaran.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi peningkatan mutu pembelajaran yaitu dalam pelaksanaannya adalah masih ada guru yang belum menguasai strategi pembelajaran, ditemukan guru yang belum sepenuhnya mengembangkan silabus secara mandiri yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis atau pemetaan SK-KD, masih ada ada guru yang menyusun RPP secara minimalis sehingga belum menggambarkan sebagai skenario pembelajaran, masih ada RPP yang belum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan, masih banyak dijumpai pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai RPP. Hal ini kemungkinan karena berbagai perangkat tersebut itu dijadikan sebagai pelengkap administrasi saja, bukan dijadikan sepenuhnya sebagai pedoman untuk mengajar dan dalam berjalannya kegiatan di sekolah.

6.2 Evaluasi Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran

Bloom (1971) mendefenisikan evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa

dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan dan menyajikan informasi untuk digunakan sebagai dasar membuat keputusan. Adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Dalam kegiatan pendidikan seharusnya para pendidik mengetahui tentang perencanaan untuk memperlancar suatu system pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien, dan dengan perencanaan yang matang maka kegiatan pendidikan akan mampu berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian, seperti ulangan, tugas-tugas, kerja kelompok, merupakan suatu proses yang disengaja dilaksanakan untuk memperoleh informasi atau data.

Dalam melaksanakan pembelajaran remedial dapat menerapkan berbagai metode dan media sesuai kesulitan serta menekankan pada segi kekuatan yang dimiliki peserta didik, yang dilaksanakan setelah pengajaran biasa (klasikal) karena pengajaran remedial yang hanya diberikan kepada siswa yang memiliki nilai di bawah nilai batas KKM yang ditetapkan sekolah. Perbedaan pembelajaran remedial dengan proses belajar mengajar biasa dalam segi tujuan, strategi, dan bahan ajar. Tetapi dari hasil pengamatan pada tiga sekolah subjek penelitian pelaksanaan remedial sepertinya tidak tampak dengan jelas. Secara keseluruhan siswa tetap secara bersama-sama mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran, sementara

peserta program remedial hanya diberikan tugas-tugas oleh guru dan sekali-sekali diberikan arahan- arahan oleh guru diruangan bimbingan dan penyuluhan.

Pembelajaran pengayaan hanya dilakukan sekali, tidak berulang- ulang seperti halnya program remedial yang dapat dilakukan melalui belajar kelompok, yaitu sekelompok siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakan bersama pada dan/atau di luar jam pelajaran. Bagi siswa yang mengikuti program pengayaan biasanya dilakukan dengan format belajar mandiri, yaitu siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakan sendiri dan kepada siswa juga dapat diberikan format pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan beberapa konten pada tema tertentu sehingga siswa dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran remedial dan pengayaan dilaksanakan untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, sementara pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai atau melampaui ketuntasan belajar.

Satuan pendidikan dapat menetapkan ketuntasan belajar lebih dari 75 sesuai dengan memperhatikan kemampuan awal siswa, kerumitan kompetensi,dan keadaan sumber daya pendidikandi satuan pendidikan tersebut. Secara umum Sekolah subjek penelitian ini menetapkan siswa naik kelas atau tidak didasarkan padahasil rapat pleno dewan guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah,seperti minimal

kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnyayang berlaku di sekolah tersebut.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa evaluasi strategi peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukan pada ketiga sekolah belum maksimal dalam alat penilaian kepada tiap siswa, masih didominasi oleh penilaian kegiatan kelas, dan dalam memberi evaluasi dalam hal remedial yang tidak diikuti dengan memperhatikan perkembangan anak kedepannya terhadap pembelajaran yang berlangsung.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Danim (2007:56) mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu:

1. Kepemimpinan Kepala sekolah; kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.
2. Guru; pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan disekolah.
3. Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat “ sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.

4. Kurikulum; adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan) dapat dicapai secara maksimal.
5. Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja.

Sekolah memiliki sebagian besar guru-guru yang telah memiliki sertifikasi keguruan dan berpengalaman menjalankan tugas pembelajaran, dan dan sebagian besar memiliki ijazah Sarjana Pendidikan. Faktor pendukung lainnya yaitu adanya kepala sekolah yang sudah memiliki pendidikan Strata 2 (S2) yang sangat berpengaruh kepada kebijakan pembelajaran di sekolah, yang dapat diamati bahwa sebagian besar guru-guru sudah memiliki kompetensi menggunakan media pembelajaran berbasis ITI dan akses materi ajar melalui Wifi. Sarana dan prasarana milik sekolah dalam kategori cukup untuk menjalankan proses berlangsungnya pembelajaran.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung di ketiga sekolah dasar sudah berpengaruh baik akan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan ketika pengaruh ini semakin baik kedepannya, maka mutu pendidikan akan semakin baik dari waktu ke waktu. Tentunya jika semua pihak dalam lingkungan sekolah tetap berusaha mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah.

Menurut Mulyasa hasil belajar ialah prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang mengacu pada pengalaman langsung. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dapat dinyatakan dengan simbol-simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan kualitas kegiatan individu dalam proses tertentu. Dengan membandingkan antara tingkah laku sebelum dengan sesudah melaksanakan belajar dapat ditentukan seberapa besar hasil belajar yang dicapai seseorang. Hasil belajar seseorang dapat ditunjukkan dengan perubahan tingkah laku yang ditampilkan dan dapat diamati antara sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan belajar. Jadi Hasil belajar adalah merupakan penilaian hasil-hasil kegiatan belajar pada diri siswa setelah melakukan proses kegiatan belajar.

Pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah telah diintegrasikannya ke dalam mata pelajaran dengan tujuan agar terbentuknya generasi bangsa selain cerdas juga berakhlak mulia. Umumnya guru sebelum membuka dan menutup pembelajaran selalu dimulai dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Guru memberikan arahan- arahan bagaimana pentingnya saling menghargai dan betapa pentingnya menuruti peraturan disiplin

yang telah digariskan sekolah. Siswa dibiasakan untuk tidak telat masuk sekolah, mengenakan baju seragam dengan rapi, selalu berbiara dengan sopan santun, menghormati perbedaan dikalangan siswa, dan tidak saling mengganggu selama proses pembelajaran.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa hasil strategi peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh ketiga sekolah dasar adalah nilai yang belum mencukupi KKM sekolah menjadi bukti bahwa perlu adanya peningkatan pada mutu pembelajaran, dan juga karakter yang ditemukan belum sepenuhnya dihidupi oleh tiap peserta didik. Hal ini harus menjadi tugas guru dalam menyampaikan juga menjadi contoh nyata yang dapat dilihat oleh siswa.

Berbagai kenyataan tidak optimalnya mutu sekolah dasar dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah manajemen pendidikan. Dalam kenyataan, manajemen pendidikan sekolah yang selama ini sentralistik telah menempatkan sekolah pada posisi marginal, kurang berdaya, kurang mandiri, dan bahkan terpasung kreativitasnya.

Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat suatu bangsa. Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan derajat sosial masyarakat bangsa, sekolah dasar sebagai intitusi pendidikan pertama perlu dikelola, dimenej, diatur, ditata dan diperdayakan, agar sekolah dasar dapat menghasilkan out put yang berkualitas.

Penerapan disesuaikan dengan pemberlakuan Manajemen Mutu Sekolah dibagi dalam tiga tingkatan Manajemen Mutu Sekolah secara penuh (tinggi), Manajemen Mutu Sekolah tingkat menengah (sedang), sekolah dan Manajemen Mutu Sekolah secara minimal (rendah). Konsep Manajemen Mutu Sekolah ini merupakan ide baru dalam wacana manajemen pendidikan di Indonesia. Sebagai ide baru tentu saja konsep ini tidak otomatis sempurna.

TQM (Total Quality Manajemen) atau Manajemen Mutu Terpadu (MMT) dibidang pendidikan merupakan konsep baru dalam rangka meningkatkan mutu total bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah yang berorientasi kepada kebutuhan penggunaan (customers) siswa dan masyarakat.

Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan manajemen yang memusatkan perhatian pada peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu dengan konsep Quality Assurance, Quality Assurance, Change of culture, Upside down organization dan Keeping close to the customer.

Aspek-aspek yang menjadi daya tawar tinggi yang dianggap sebagai ukuran mutu bagi masyarakat meliputi Manajemen mutu Peserta Didik, Manajemen mutu Tenaga Pendidikan dan Kependidikan, Manajemen mutu Kurikulum dan Pembelajaran, Manajemen mutu Keuangan, Manajemen mutu Sarana Prasarana, Manajemen mutu Hubungan Masyarakat, Manajemen mutu layanan Khusus. Strategi kepala sekolah dalam perencanaan mutu pendidikan adalah melibatkan semua

pihak di sekolah meliputi komite, guru dan personil sekolah lainnya. Perencanaan peningkatan mutu dilakukan pada awal tahun ajaran baru dan pada awal semester.

Strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan mutu pendidikan di SD adalah dengan Memberdayakan para guru mengikuti pelatihan, seminar dan sebagainya. Kepala sekolah juga memberikan wewenang yang lebih luas kepada guru dalam mengelola pembelajaran.

Strategi kepala sekolah dalam pengawasan mutu adalah melakukan supervisi dalam kisaran mingguan dan bulanan. Kepala sekolah menggunakan supervisi pengajaran dalam pengawasan mutu dengan menggunakan dua macam tehnik yaitu Teknik perseorangan dan teknik kelompok.

Rendahnya kualitas dan mutu pendidikan pada jenjang sekolah dasar sangat berpengaruh terhadap pendidikan jenjang selanjutnya. Kualitas dan mutu pendidikan merupakan suatu tujuan dan acuan penting dalam pelaksana pendidikan. Kualitas dan mutu pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan menciptakan sumber daya peserta didik yang kompeten dan mampu bersaing. Masih banyak Sekolah Dasar yang masih memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah, namun hal ini merupakan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar. Rendahnya kualitas pendidikan di Sekolah Dasar akan mempengaruhi terhadap pendidikan jenjang selanjutnya. Untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjangn lebih tinggi peserta didik Sekolah Dasar harus dibekali dengan kualitas dan mutu pendidikan yang baik dan berkompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- A.Doni Kusuma, (2007). *Pendidikan Karakter, Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo
- Abdul Wahab, Solichin (2012). *Analisa Kebijakan; Dari Formulasi ke Penyusunan Model - model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- AR, Murniati dan Usman Nasir (2009).*Implementasi Manajemen Stratejik; Dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan*, Bandung:Citapustaka Media Perintis
- Azhar Arsyad,(2009), *Media Pembelajaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Fadjar, A. Malik. 2005. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo
- Farida Yusuf,EV(2008), *Program dan Instrumen Evaluai Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- George Barna. 002. *Leaders on Leadership, Pandangan para pemimpin tentang Kepemimpinan*, Malang: Penerbit Gandum Mas.
- Harun, Cut Zahri (2009), *Manajemen Sumber Daya Pendidikan, Pena Persada*, Jakarta

- Hunger, D.J dan Heelen L.T 2003. *Manajemen Strategis Alih Bahasa*, Yogyakarta: Andi.
- Janse Belandina Non- Serrano. 2009. *Profesionalisme guru dan Bingkai Materi*, Bandung: Bina Media Informasi.
- Kasijan, Z . 1984. *Psikologi Pendidikan, Buku 1*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Ngalim Purwanto, (1988). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Karya *Pembelajaran, Manajemen Kesiswaan, Manajemen Sarana dan Manajemen Pembiayaan*, Jakarta: Dijen Pendas. *Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*, Jakarta: PT. Grasindo,
- Poerwadarminta. W. J. S., 1993 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Raka Joni. 1980. *Strategi Belajar Mengajar. Suatu Tinjauan Pengantar*, Jakarta: P3G Dep.P&K.
- Sadiman, dkk. (2009), *Media Pendidikan Pengemangan dan Pemanfaatannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sagala, S. 2013. *Manajemen Strategis Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* Bandung: Alfabeta
- Sanusi, A. (2013). *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Nussa Cendekia
- Semiawan, Conny R., dan Soedijarto. 1991. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*, Jakarta: PT. Grasindo,
- Sumadi Uryabrata. 1993. *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Andi Obset.

- Suyanto. 2001. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah: *Strategi Pendidikan Nasional dalam era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Uhamka Ekspres.
- Tim Dosen Pendidikan UPI, 2009. *Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Usman, Husaini, 2013. *Manajemen, Dalam Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Usman, Nasir. 2012. *Manajemen Peningkatan Mutu kinerja Guru: Dalam Konsep, Teori dan Model*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis
- Vincen P Costa (2000), *Panduan Pelatihan untuk Mengembangkan Sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- Wina Sanjaya, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, Jakarta: Prenada Media Grup
- Yunus, Mahmud. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara.
- Zainal Aqib. 2013. *Model-model, Media dan Strategi Pembelajaran Kontekstual*: Bandung: Penebit Yrama widya

II. JURNAL

- Afandi, M., Chamalah, E., Wardani, O. P., & Gunarto, H. (2013). *Model dan metode pembelajaran*. Semarang: UNISSULA.
- Agusta, A. R., Setyosari, P., & Sa'dijah, C. (2018). Implementasi Strategi Outdoor Learning Variasi Outbound untuk Meningkatkan Kreativitas dan

- Kerjasama Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 3(4), 453-459.
- Arsyad, A. (2011). Media pembelajaran.
- Bruner, J.S. tt. *The Process of Education*, New York: Vistage Books
- Calam, A., & Qurniati, A. (2016). *Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan*. *Jurnal Saintikom*, 15(1).
- Chandra Prahesti, H., & Sri Sutarni, M. P. (2017). *Eksperimen Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Project Based Learning pada Pembelajaran Matematika terhadap Hasil Belajar ditinjau dari Keaktifan Belajar Siswa (Pada siswa kelas VII Semester Genap di SMP Negeri 1 Nguter Tahun 2016/2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Fauzi, (2011). Analisa Karakter Siswa
- Hernawan, A. H., & Novi, R. (2009). Konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hidayat, A. (2012). Konsep Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (Paikem). *An Nur: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 39-50.
- Karno, R., Windayati, V. P., & Afifah, N. (2017). *Pengembangan Media Pembelajaran Herbarium Pada Materi Organ Tumbuhan Di SMP N 5 Rambah Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).

- Klausmeller, N. J., Goodwin, W. 1971. *Learning and Human Abilities Educational Psychology*, New York: Harver and Row Publishers, Inc.
- Maamarah, S., & Supramono, S. (2016). Strategi Peningkatan Mutu dan Citra (Image) Sekolah Dasar Negeri Di Ungaran, Semarang. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 115-130.
- Nasution, M. I. P. (2016). Strategi pembelajaran efektif berbasis mobile learning pada sekolah dasar. *IQRA': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 10(1).
- Nur, S., Halidjah, S., & Tampubolon, B. (2014). *Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pkn Dengan Model Cooperative Learning Tipe Two Staytwo Stray* (Doctoral dissertation, Tanjungpura University).
- Nurdyansyah, N., & Fitriyani, T. (2018). Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Terhadap Hasil Belajar Pada Madrasah Ibtidaiyah. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Nurfuadi, N. (2019). *MANAJEMEN KOMPETENSI GURU DALAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN*.
- Saifulloh, M., Muhibbin, Z., & Hermanto, H. (2012). *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah*. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 5(2), 206-218.
- Semiawan, Conny R., dan Soedijarto. 1991. *Mencari Strategi Pengembangan*
- Setiawan, D. (2019). *Pemberdayaan Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SLB*. *Indonesian Journal of*

Education Management & Administration Review, 2(1), 177-182.

Sewang, A. (2017). Keberterimaan Google Classroom sebagai alternatif Peningkatan Mutu di IAI DDI Polewali Mandar. *JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)*, 1(1), 35-46.

Silitonga Manumpak.212. *Kompleksitas Variabel Yang Mempengaruhi Hasil Belajar.Tinjauan variable Kreativitas dan Strategi pembelajaran terhadap Hasil Belajar siswa SMK Teknologi Industri di Kota Medan.*Laporan Penelitian. Medan: FT Unimed

Suhadianto, (2009). *Pentingnya mengenal Kpribadian Siswa Untuk meningkatkan Prestasi.*

Sunaengsih, C. (2016). Pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran pada sekolah dasar terakreditasi A. *Mimbar Sekolah Dasar*, 3(2), 183-190.

Suyahman, S. (2017). *Peningkatan Mutu Pembelajaran PPKn melalui Penerapan Model Pembelajaran Interaksi Sosial Terpadu dengan Modifikasi Tingkah Laku di SMP Negeri 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2017-2018.*

Suyanto2011. *Manajemen Kepala sekolah, Manejemen Kurikulum, Manejemen*

Ward, James. 2000. *Reclaiming International Mindset of Education in Global Era.*

III. Peraturan

Departemen Pendidikan Nasional (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2007, tentang *Standar Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta:Depdiknas

Direktorat Jendral Dikdasmen (2002). DBL untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah/madrasah. Panduan umum untuk Tim DBL, Komite/Dewan Sekolah SD/SLTP/MTs, DPIU, PPCU, dan CPCU di Provinsi Jawa Barat, Banten Sumut, Riau Bengkulu, Sulses, Maluku dan Maluku Utara, Jakarta.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2000 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang *Standar Kepala Sekolah*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang *Kompetensi Akademik dan Kompetensi Guru*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang *Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1992 tentang *Komite Sekolah*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*

Permendiknas RI No.19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Jakarta: Kemendikbud RI,

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Kemendikbud RI, "

Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, *Arsip Nasional RI*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.